

**KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
PARIT I/II KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN  
SIAK TAHUN 2014-2015**

**Galih Ghozali Yusuf**

Email : [galiezz66@yahoo.co.id](mailto:galiezz66@yahoo.co.id)

**Pembimbing** : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si  
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru  
28293-Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research is based on the quality of village development planning which is very important for the village in determining future development. In its implementation, there are obstacles such as community participation is still not maximal / up and down, and not yet in favor of the community, attendance of musrenbangdes participants dominated by village government and ineffective development proposal in musrenbangdes. This study aims to describe the quality of village development planning and find out the ineffective development priority proposals. The method used in this research is descriptive approach method with qualitative research type. The type of research data is primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are interviews and documentation. Technical analysis of data used is descriptive qualitative data analysis.*

*The results show that the quality of village development planning is still not good. This can be seen from some data obtained from the villages, districts, and field data collected. The right solution to overcome these problems is the need for support from the village government in increasing the participation of the community both the socialization and the direct plunge of the field and the need for the provision of understanding in the form of motivation to the community to be more active in issuing opinions or proposals in accordance with the wishes and needs of society ..*

***Keywords:*** *Quality, Village Development Planning.*

## Pendahuluan

Perencanaan pembangunan ternyata masih mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Ada tiga alasan utama mengapa perencanaan pembangunan masih tetap banyak di gunakan di negara berkembang, yaitu yang pertama, Karena mekanisme pasar belum berjalan secara sempurna (*market failure*). Yang kedua, karena adanya ketidakpastian masa datang sehingga perlu disusun perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi kemungkinan situasi buruk yang mungkin timbul dikemudian hari berikut tindakan dan kebijakan preventif yang perlu dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, untuk dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik terhadap para pelaku pembangunan, baik dikalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat secara keseluruhan sehingga dalam jangka panjang akan terwujud proses pembangunan yang terpadu, bersinergi, dan saling menunjang satu sama lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab II pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan,
5. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 23 Ayat 1, Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. disebutkan bahwa musyawarah desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga desa berhak untuk hadir sebagai peserta Musyawarah Desa.

Dalam mewujudkan kualitas perencanaan yang baik, Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 4 tahun 2012 tentang penyusunan perencanaan pembangunan pada pasal 4 ayat 2 di jelaskan:

1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan

kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan diperdesaan secara serius memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun masyarakat.
6. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia

Kualitas musrenbangdes di desa Parit I/II memiliki permasalahan yang menarik untuk diteliti yakni pada kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2014-2015. Permasalahan pertama di desa ini adalah tentang keterlibatan peserta dalam musrenbangdes dari tahun ke tahun didominasi oleh pemerintah desa. Berikut ini tabel daftar hadir musrenbangdes desa Parit I/II.

**Tabel 1.1 Daftar Hadir Musrenbangdes Desa Parit I/II Pada Tahun 2014-2015**

No	Tahun 2014		Tahun 2015	
	Klasifikasi	Jumlah	Klasifikasi	Jumlah
1.	Pemerintah Kecamatan	4	Pemerintah Kecamatan	4
2.	Pemerintah Desa	10	Pemerintah Desa	16
3.	Lembaga Desa	16	Lembaga Desa	26
4.	Tokoh Masyarakat	6	Tokoh Masyarakat	9
5.	Tokoh Pemuda	3	Tokoh Pemuda	5
6.	Tokoh Agama	2	Tokoh Agama	6
7.	Kelompok Perempuan	2	Kelompok Perempuan	4
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>Jumlah</b>	<b>70</b>

Sumber: Data Olahan 2016

Pada penjelasan tabel 1.1 dapat dilihat jumlah yang hadir pada tahun 2014 sebanyak 43 orang dari 55 orang yang diundang, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 70 orang dari 100 orang yang diundang. Satu hal permasalahan yang sangat terlihat pada tabel ini yaitu kehadiran peserta musrenbangdes didominasi oleh pemerintah desa dan lembaga desa. Sehingga peneliti berasumsi dan menyimpulkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan desa parit I/II masih belum dapat dikatakan baik, karena masih didominasi oleh pemerintah desa

Selain itu Desa Parit I/II juga memiliki permasalahan lainnya dalam kegiatan musrenbangdes ini, yakni minimnya usulan dalam daftar kegiatan prioritas pembangunan desa Parit I/II pada tahun 2014

dan 2015, dan juga terlihat kurangnya perbedaan prioritas pembangunan desa dari tahun ketahunnya. Pada tahun 2014 Prioritas Pembangunan lebih banyak berupa bidang fisik infrastruktur desa, begitu juga pada tahun 2015 yang hanya memprioritaskan bidang fisik infrastruktur desa juga. Berikut ini tabel daftar usulan pembangunan pada musrenbangdes desa parit I/II:

**Tabel 1.2 Daftar Prioritas Usulan Pembangunan Desa Parit I/II kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Tahun 2014 dan 2015**

No	Usulan Kegiatan Tahun 2014	Usulan Kegiatan Tahun 2015
1.	Pagar makam Dusun I	Leaning beton Jl. Sido Mulyo Dusun III
2.	Semenisasi jalan Dusun III	Semenlisasi Jl. Sido Mulyo Dusun III
3.	Leaning Beton Dusun III	Bes Jl. Ismail Dusun III
4.	Leaning Beton Dusun II	Leaning Beton Jl. Ismail Dusun II
5.		Aspal Goreng Jl. Sri Mersing

Sumber : Rekapitulasi Hasil Musrenbangdes Desa Parit I/II Tahun 2014-2015

Pada Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat dalam daftar usulan kegiatan prioritas pembangunan desa Parit I/II pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014 hanya ada 4 usulan kegiatan prioritas dan pada tahun 2015 hanya ada 5 usulan kegiatan prioritas

pembangunan, Dengan melihat hal tersebut dapat dikatakan Kualitas Perencanaan pembangunan desa Parit I/II masih dibawah stadard, artinya usulan masyarakat pada musrenbangdes desa Parit I/II harus ditingkatkan sesuai keinginan dan harapan masyarakat.

**Tabel 1.3**

**Jumlah Keseluruhan Hasil Musrenbangdes Desa Parit I/II**

No	Tahun	Jumlah Masyarakat yang di undang	Jumlah Masyarakat Yang Hadir	Jumlah Usulan	Jumlah Realisasi
1	2014	55	43	4	7
2	2015	100	70	5	6

Sumber: Data olahan 2017

Pada tabel 1.3 dapat kita lihat pada tahun 2014 jumlah masyarakat yang hadir 43 orang dari 55 undangan, tetapi usulan yang di hasilkan hanya ada 4 usulan. Begitu juga pada tahun 2015 yaitu jumlah masyarakat yang hadir 70 orang dari 100 undangan, tetapi hanya ada 5 usulan. hal ini berarti menunjukkan kualitas perencanaan pembangunan desa parit I/II dapat dikatakan belum baik. Terkait dengan hal tersebut, maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengetahui gambaran lebih mendalam Tentang “Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Tahun 2014 dan 2015”.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Kehadiran peserta musrenbangdes masih didominasi oleh pemerintah desa dan Prioritas Pembangunan Desa dari tahun ketahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dari masalah pokok tersebut

dapat dijabarkan pertanyaan spesifik sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensi Kualitas Perencanaan Pembangunan di Desa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tahun 2014 dan 2015 ?
2. Mengapa Usulan Prioritas Pembangunan dalam hasil Musrenbangdes Desa Parit I/II tidak mengalami peningkatan dan perubahan yang signifikan pada tahun 2014 dan 2015?

## **Kerangka Teori**

### **1. Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan pembangunan desa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui upaya pengembangan potensi yang dimiliki, guna mewujudkan kepentingan kelompok masyarakat setempat. Perencanaan pembangunan desa sebenarnya sudah menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setiap tahunnya. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa menurut Wahjudin Sumpeno adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/ sektor dan kelembagaan dalam kerangka yang sama.

### **2. Kualitas**

Kualitas adalah ukuran baik dan buruknya sesuatu. Kualitas pula dapat didefinisikan sebagai tingkat keunggulan.

Menurut Tjiptono dan Diana terdapat beberapa kesamaan elemen-elemen dari sekian banyak definisi kualitas yang ada, sebagai berikut :

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan masyarakat.
2. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas dimasa yang akan datang).

### **3. Model-model Perencanaan Pembangunan**

Menurut Azam Awang (2010), terdapat tiga model pembangunan perdesaan diantaranya sebagai berikut : Pertama, model "*Community Development*" atau "Pembangunan Masyarakat", model ini mengajarkan kepada penduduk perdesaan keterampilan sosial, ekonomi dan politik agar tercipta masyarakat yang modern. Kedua, model "Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan", model ini merupakan "*empowerment*" atau pemberdayaan masyarakat yang mengusung tema pembangunan dari bawah/partisipasi masyarakat atau "*bottom-up*". Ketiga, model "Desentralisasi", yaitu pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat bawah untuk melaksanakan program-program yang direncanakan

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data.

Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini menemukan permasalahan tentang kualitas perencanaan pembangunan desa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

## HASIL PENELITIAN

### A. Urgensi Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Parit I/II

#### 1. Urgensi Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Parit I/II

Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program / proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Perencanaan partisipatif masih merupakan paradigm yang relevan. Masyarakat sebagai sumberdaya pelaku pembangunan disuatu daerah (perdesaaan) harus diberdayakan dalam penyusunan rencana/ program pembangunan, karena mereka adalah yang paling mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan kepenringan menurut kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Secara kuantitatif proses partisipatif memang jauh lebih sering dilakukan. Beberapa pengalaman kasus-kasus menunjukkan kualitas yang sangat tinggi tapi keberhasilan masih sangat tergantung pada *interest* personal bukan karena adanya perubahan sistem dan intensif. Masyarakat diinformasikan dan dikonsultasikan tetapi umumnya masih tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Dari semua pengalaman yang ada, belum Nampak hasil yang memuaskan dalam rangka mendorong partisipasi kelompok miskin atau kelompok marginal termasuk perempuan.

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan atau partisipasi tersebut terdapat

dua cara dalam perencanaan pembangunan. Cara yang pertama, adalah mobilisasi kegiatan-kegiatan masyarakat serasi untuk kepentingan-kepentingan pencapaian tujuan pembangunan. Pada pokoknya keterlibatan lebih didasarkan atas hubungan satu arah dari atas kebawah. Cara yang kedua, adalah dengan meningkatkan oto-aktivitas, swadaya dan swakarya masyarakat sendiri. Terutama ditunjukkan kepada sektor usaha swasta, termasuk dalam hal ini sektor luas dalam kegiatan masyarakat dibidang pertanian, dunia usaha, dan lain-lain. Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakaksanaan, penciptaan iklim yang sehat, penggunaan mekanisme pasar dan harga, dan pelaksanaan program-program partisipatif.

Berikut kutipan dari kepala desa Parit I/II yaitu Bapak Sukardi menyatakan :

*“ Kualitas perencanaan pembangunan itu tergantung dari masyarakat itu sendiri, apabila masyarakat itu banyak yang ikut berpartisipasi dan tidak mengabaikan undangan dari pemerintah desa maka kualitas perencanaan pembangunan itu akan terjadi sesuai kehendak masyarakat itu sendiri”.* (Wawancara dengan Bapak Sukardi pada tanggal 01 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan dapat dilihat dari partisipasi masyarakat. Berikut partisipasi masyarakat desa Parit I/II dalam musrenbangdes dari tahun 2014-2015:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Peserta Hadir Musrenbangdes**  
**Desa Parit I/II Tahun 2014 dan 2015**

No	Tahun 2014/50	Tahun 2015/100
	Undangan	Undangan
	Nama	Nama
1	Sukardi	Afma Syuryani
2	Mardiasi	Dr. Irmayani
3	Nasrun	Sukardi
4	Sukisno	Syahrul
5	Samsul	Junaidi
6	A. Yusuf	Sukisno
7	Suyanto	Dartuti

8	Iis gianto	Zulanda W.s
9	Bujari	Surneri
10	Sukardi	Nurmayunita
11	Sutio	Romai Putri
12	Sukardi	Sri Jemat
13	Sukadi	Nurmala Sari
14	Amran	Dahari
15	Ruslanto	Supandi
16	Dartuti	Sukadi
17	Igusniati	Muhad Woloy
18	Kamisah	Bahar Umain
19	Sri Andayani	Saimor
20	Hasyim R	Mansyur
21	Riadi	Indra Yana
22	Sammer	Suhalmi
23	Slamet	Asrul
24	H. Ridho	Syamsyudin
25	Makmur	Abbas. S
26	Suhalmi	H. Roduan
27	Anasir	Sutaji
28	Efendi	Rusli Yanto
29	Bejo S	Musri
30	Sutaji	Syamsul
31	Dahari	Safrudin
32	Bukhari	Rotir
33	M. Hamadi	Makmur
34	Suryadi	Heryadi
35	Jumali	Mahlil
36	Sahmodi	Afrizal
37	Suhani	Nawar
38	Untung P	Matyani
39	Maryanto	Supratman
40	Hadali	Purwanto
41	Suindraningsih	Diswan
42	Susilah	Suyanto
43	Nurmala Sari	Agus
44		Sukardi
45		Musfa'in
46		Riadi
47		Suyio
48		Bujari
49		Yusuf
50		Hamadi
51		Anasir
52		Untung Pryanto
52		Syaprudin
54		Sugendi
55		Suhadi
56		Kamisah
57		Slamat. R
58		Igusniati
59		Sumdroningsih
60		Muslim

61		Nurwita
62		Tato
63		Jumali
64		Sumot Riyndi
65		Joni Saputra
66		Solikin
67		Sumafuji
68		Devi Fitriah
69		M. Amin
70		Siti Khodijah

Sumber :Rekapitulasi Musrenbangdes Tahun 2014-2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta musrenbangdes di desa Parit I/II pada tahun 2014 terdapat 43 peserta dari 50 undangan dan pada tahun 2015 terdapat 70 peserta dari 100 undangan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di desa Parit I/II pada tahun 2014 dan tahun 2015 ada peningkatan, akan tetapi peserta musrenbangdes desa Parit I/II masih saja didominasi oleh pemerintah desa ataupun lembaga-lembaga desa. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta musrenbangdes yang di undang lebih banyak mengarah pada aktor formal.

## 2. Perencanaan Pembangunan Berpihak Pada Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di perdesaan secara serius memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin. Proses musrenbangdes desa Parit I/II kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dimulai dari adanya surat edaran dan jadwal musrenbangdes dari camat kecamatan Sungai Apit yang disebarkan ke masing-masing desa se-kecamatan Sungai Apit.
2. Setelah adanya surat edaran tersebut maka Pemerintah Desa Parit I/II memberitahukan kepada Kepala Dusun/Ketua RW dan Ketua RT

tentang akan diadakannya Musrenbangdes.

- Media yang digunakan untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Musrenbangdes hanya melalui media undangan saja tanpa pengumuman secara terbuka kepada masyarakat.

**Tabel 3.2**  
**Daftar Hadir Musrenbangdes Desa Parit I/II Berdasarkan Jabatan Tahun 2013-2016**

No	2013	2014	2015	2016	JABATAN
1	3	4	4	2	Pemerintah Kecamatan
2	6	10	16	12	Pemerintah Desa
3	14	16	26	22	Lembaga Desa
4	3	6	9	6	Tokoh Masyarakat
5	2	3	5	4	Tokoh Agama
6	2	2	6	5	Tokoh Pemuda
7	2	2	4	4	Kelompok Perempuan
	32	43	70	55	Jumlah

Sumber : Data Olahan 2017

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta musrenbangdes desa Parit I/II dari tahun ketahunnya masih didominasi oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa. Dari undangan yang di sebar, aktor formal yang hadir dalam musrenbangdes pada tahun 2014 berjumlah 30 orang sedangkan aktor informal berjumlah 13 orang, sedangkan pada tahun 2015 aktor formal yang hadir berjumlah 46 orang sedangkan aktor informalnya berjumlah 24 orang. Dalam proses musrenbangdes ini belum berpihak kepada masyarakat, karena aktor-aktor formal masih mendominasi jalannya musrenbangdes tersebut.

Sehingga untuk lebih mendekatkan perencanaan ke aspirasi masyarakat, salah

satu usaha yang harus ditempuh adalah memberikan kejelasan tentang program-program yang hendak dilaksanakan, sehingga masyarakat benar-benar mengerti apa yang hendak dilaksanakan, besaran dana yang akan digunakan dan sumber pembiayaan yang akan digunakan. Adapun peserta musrenbangdes yang diundang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Peserta yang diundang dalam Musrenbangdes Desa Parit I/II Pada Tahun 2014-2015**

No	Tahun 2014		Tahun 2015	
	Klasifikasi	Jumlah	Klasifikasi	Jumlah
1.	Pemerintah Kecamatan	4 Orang	Pemerintah Kecamatan	4 Orang
2.	Pemerintah Desa	16 Orang	Pemerintah Desa	30 Orang
3.	Lembaga Desa	20 Orang	Lembaga Desa	30 Orang
4.	Tokoh Masyarakat	6 Orang	Tokoh Masyarakat	10 Orang
5.	Tokoh Agama	3 Orang	Tokoh Agama	10 Orang
7.	Tokoh Pemuda	3 Orang	Tokoh Pemuda	6 Orang
8.	Kelompok Perempuan	3 Orang	Kelompok Perempuan	10 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>55 Orang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>100 Orang</b>

Sumber : Data Olahan 2017

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa undangan yang di sebar di desa parit I/II lebih banyak ke lembaga-lembaga desa dan pemerintah desa. Hal ini mengindikasikan bahwa undangan yang disebar dalam perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.

### **B. Prioritas Usulan Pembangunan Desa Parit I/II**

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang prioritas dan usulan



pembangunan desa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Di sisi lain, perhatian dan bentuk responsif pemerintah desa pada musrenbangdes itu cukup membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan yang memiliki kesempurnaan, selalu memerlukan interaksi sehari-hari dengan para warga, dan menjadikan pendapat-pendapat mereka sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Wajah perencanaan desa yang mampu mengungkit peningkatan kesejahteraan desa, dimandatkan kepada Kepala Desa bersama perangkatnya. Permasalahannya adalah masih banyak desa yang belum terlatih menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa. dimana awalnya usulan dari setiap dusun yang menjadi acuan dalam menentukan daftar prioritas program pembangunan desa. namun hal ini berubah karena terdapat pengaruh atau intervensi dari pihak tokoh tokoh kepentingan atau tokoh desa yang hadir sehingga terjadi penambahan program diluar usulan yang berasal dari setiap dusun atau bahkan terjadi pengurangan usulan yang berasal dari dusun demi terealisasikannya usulan yang diajukan oleh tokoh masyarakat tersebut.

Di desa Parit I/II Prioritas usulan pembangunan hanya fokus kepembangunan fisik saja. Berikut prioritas usulan pembangunan yang di hasilkan pada musrenbangdes desa Parit I/II tahun 2014-2015.

**Tabel 3.4**  
**Daftar Prioritas Usulan**  
**Pembangunan**

No	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pagar Makam Dusun I	Leaning Beton Dusun III
2	Semenisasi Jalan Dusun III	Semenisasi Jalan Dusun III
3	Leaning Beton Dusun III	Bes Jalan Ismail Dusun III

4	Leaning Beton Dusun II	Leaning Beton Dusun II
5		Aspal Goreng Dusun I

Sumber : Data olahan 2017

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa prioritas usulan pembangunan di desa Parit I/II pada tahun 2014-2015 tidak banyak mengalami peningkatan dan lebih membahas pada infrastruktur jalan.

Di desa Parit I/II Prioritas usulan yang dihasilkan dalam musrenbangdes secara keseluruhan hanya pada bidang fisik saja, dan aktor yang mengusulkan usulan oleh aktor formal. Berikut tabel Prioritas usulan pada tahun 2014:

**Tabel 3.5**  
**Prioritas Usulan Pembangunan Tahun**  
**2014**

Usulan Bidang	Jumlah	Usulan Dari
Fisik	4	Aktor Formal
Perhubungan	0	-
Pendidikan	0	-
Kesehatan	0	-
Ekonomi Kerakyatan	0	-
Perumahan	0	-
Pemuda Dan Olahraga	0	-
Sosial	0	-
Kebudayaan	0	-
Sarana Ibadah	0	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	

Sumber: Data Olahan 2017

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa usulan yang dihasilkan pada tahun 2014 yaitu berupa usulan fisik saja, dan aktor yang mengusulkan yaitu dari kalangan aktor formal. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas dari perencanaan pembangunan 2014 masih tidak efektif, karena jumlah

peserta musrenbangdes tidak sesuai dengan usulan yang dihasilkan. Pada tahun 2015 perencanaan pembangunannya juga tidak efektif berikut tabel prioritas usulan pada tahun 2015:

**Tabel 3.6**  
**Prioritas Usulan Pembangunan Tahun 2015**

Usulan Bidang	Jumlah	Usulan Dari
Fisik	5	Aktor Formal
Perhubungan	0	-
Pendidikan	0	-
Kesehatan	0	-
Ekonomi Kerakyatan	0	-
Perumahan	0	-
Pemuda Dan Olahraga	0	-
Sosial	0	-
Kebudayaan	0	-
Sarana Ibadah	0	-
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>

Sumber: Data Olahan 2017

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa usulan yang dihasilkan pada tahun 2015 sama pada tahun sebelumnya yaitu berupa usulan fisik saja dan yang mengusulkan juga dari kalangan aktor formal. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas perencanaan pembangunan di desa Parit I/II masih belum baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Parit I/II masih belum berjalan dengan baik karena dalam perencanaan pembangunan partisipatif, partisipasi masyarakat desa Parit I/II masih didominasi oleh aktor formal dan minim sekali ketelibatan aktor informal. Dan pada perencanaan pembangunan berpihak pada masyarakat juga masih dikatakan belum baik karena undangan yang disebarkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat lebih banyak mengarah pada aktor formal.
2. Prioritas Usulan Pembangunan desa Parit I/II sangat tidak efektif karena dari jumlah peserta musrenbangdes yang hadir tidak sesuai dengan usulan yang di harapkan. Dan realisasi pembangunan desa parit I/II sangat berbeda jauh dari usulan yang di hasilkan dalam musrenbangdes.

### 2. Saran

Untuk Menciptakan Deliberasi Pembangunan Desa yang lebih baik, maka ada beberapa saran yang mungkin perlu dipertimbangkan :

1. Untuk Pemerintah Desa

Bagi Pemerintah Desa disarankan kedepannya memberikan dukungan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat seperti sosialisasi atau terjun langsung kelapangan Serta Pemerintah Desa Disarankan untuk kedepannya lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan usulan dengan anggaran supaya tidak banyak perbedaan usulan dengan realisasi yang dihasilkan.

2. Untuk Unsur Masyarakat Desa

Bagi Unsur Masyarakat Desa disarankan untuk lebih mengontrol kembali kinerja pemerintah desa, lebih aktif lagi didalam

menyampaikan usulan yang ingin di sampaikan, agar kepentingan yang merupakan kebutuhan masyarakat tersebut dapat terealisasi dan tentunya dapat mempengaruhi suatu pengambilan kebijakan pada musrenbangdes tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Adisasmitha, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Djohani Rianingsih. 2008. *"Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa"*, Masetra.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga.
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit Suatu Bahan Pengantar*. Yogyakarta : Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan desa*, Jakarta : Cetakan pertama
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Moran, Michael. 2015. *Handbook Kebijakan Publik*. Bandung : ISBN.
- Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muslimin. 2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Malang : Bayu Media dan UMM.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan daerah dalam era otonomi*, Jakarta : Rajawali.
- Subiyantoro, Arif. 2007. *Metode dan Teknk Penelitian Sosial*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah Sj, 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good*

*Governance*, Jakarta:  
Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak  
nomor 4 tahun 2014 Tentang  
Penyusunan Perencanaan  
Pembangunan

Suprioyono, RA. *Akuntansi biaya dan akuntansi manajemn untuk teknologi maju dan globalisasi*, Yogyakarta :BPFE

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Yansen. 2014. *Revolusi Dari Desa Saatnya Pembangunan Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat*. Jakarta : PT Gramedia.

Zulkarimen, Nasution. 2002. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori Dan Penerapannya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang No.25 Tahun 2004  
Tentang Perencanaan  
Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 114 Tahun 2014  
Tentang Pedoman  
Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 2  
Tahun 2015 Tentang  
Pedoman Tata Tertib Dan  
Mekanisme Pengambilan  
Keputusan Musyawarah  
Desa.